

# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN I**

### **TRANSKRIP WAWANCARA**

Pewawancara : Aziza A. Pradika  
Narasumber : Ibu Jumiye dan Ibu Sargini (Aktivis dan Anggota dari JALA PRT dan SPRT Tunas Mulia Yogyakarta)  
Tanggal : 13 November 2019  
Lokasi : Ampera Avenue Residence, Jakarta Selatan

Pewawancara : Bagaimana posisi ibu dalam JALA PRT?  
Narasumber : Saya sendiri dari serikat PRT Tunas Mulia DIY, salah satu serikat yang menjadi anggota JALA PRT, yang mana JALA PRT juga berawal dari Yogyakarta. Sebelum JALA PRT terbentuk, awalnya ada Rumpun cut nyak dien yang dimulai dari pergerakan mahasiswa ditahun 1989 yang terus melakukan diskusi mahasiswa. Lalu terjadi kasus yg terjadi saat itu kasus di ngawi, pekerja rumah tangga yang tidak terbayarkan nyawanya, maka termasuk Lita Anggraini bersepakat focus kepada permasalahan PRT. Pertama mengorganisir itu di gunung kidul pada tahun 1997, dilanjut mengorganisir PRT di DIY (cut nyak dien). Maka dihasilkan kelompok atau operata (organisasi pekerja rumah tangga) yang membuat kemudian jaringan dan melakukan diskusi, tentang PRT. Dari situ, teman-teman yang didukung oleh cut nyak dien menjadi SPRT Tunas Mulia tahun 2003. Lalu 2004 dibentuk JALA PRT yang melanjutkan cut nyak dien agar menasionalkan advokasi, saat itu ada kapal perempuan dan institute perempuan dan perserikatan di Yogyakarta ikut mendirikan JALA PRT. Agar tidak hanya di Yogyakarta maka jadi ada JALA PRT agar nasional. PRT butuh adanya UU, maka dibentuk draft PRT dan diajukan di DPR pada tahun 2004. Dan di 2007 pindah office ke Jakarta.

- Pewawancara : Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang mendorong dilakukannya pergerakan PRT?
- Narasumber : Kasus itu terjadi karena tidak ada UU yang bisa melindungi kekerasan tersebut, tidak ada pemerintah ataupun masyarakat yang peduli. Dan di tahun 2001, Sunarsih ada PRT yang mengalami kekerasan fisik, ada yang tidak diupahi selama 9 tahun tidak diberikan, makan nasi basi dan tidur ditempat peliharaan. Sempat sampai ranah hukum tetapi karena tidak ada UU maka majikan hanya dihukum percobaan 2 bulan, dan upah dibayar hanya berapa persen saja. Setelah jala pindah ke Jakarta, sudah muncul operata lain pada 2007 di semarang, lampung, makasar. Sebenarnya di 2004 ada di Jakarta tetapi tidak aktif. Disusul 2014 sampai sekarang ada 8 serikat di Indonesia.
- Pewawancara : Dalam proses advokasi ini, bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia mengenai isu PRT?
- Narasumber : Kalau dibandingkan dulu dengan masa kini, semakin tercerahkan khususnya di sisi majikan, sudah berorganisasi, mulai ada libur mingguan, gaji sedikit lebih banyak dibanding yang belum berorganisasi, lebih sedikit yang mendapat upah tidak sesuai dengan beban kerja. Rata-rata 600-800 ribu perbulan. Tetapi secara keseluruhan masih dibawah standard.
- Pewawancara : Apa yang mendorong aktivis untuk memulai pergerakan ini dan apa pengaruh pribadinya?
- Narasumber : Karena begini, sekarang PRT sudah mengerjakan banyak hal bukan hanya membantu, “kerja” maka sama dengan pekerja lainnya. Mengapa kami semangat karena itu, karena PRT kan sama saja seperti pekerja di pabrik, yang sudah kami mulai kan di Yogyakarta sudah ada sekolah PRT agar memiliki kemampuan dan keterampilan dan kesadaran kritis dari 2003-2015 kalau di DIY. Salah satu bentuk advokasi kami yaitu untuk menerapkann kontrak tertulis agar ada hubungan

antara majikan dengan PRT termasuk upah ,libur mingguan dan beban kerja.

- Pewawancara : Bagaimana respon pemerintah saat JALA PRT muncul sebagai jaringan yang lebih luas?
- Narasumber : Mulai di Yogyakarta, bersama dengan LSM yang di jogja, JPPRT, membuat draft Raperda PRT di tahun 2004, awalnya ke Sleman tapi ditolak, kemudian ke kota yang didukung oleh DPRD dan Wali Kota meskipun tidak langsung dibahas. 2003 ada surat edaran gubernur untuk membuat peraturan Pekerja rumah tangga, tetapi tidak dilanjutkan ke tahap DPRD atau Kabupaten/Kota. 2010 ada peraturan gubernur No.31, kemudian dilanjut ada peraturan walikota No. 48 thn 2011. Dari situ meskipun kita local, nasional juga dilakukan advokasi, kami melakukan demonstrasi dan audiensi di DPR RI dan Presiden, kita melakukan segala hal, pernah mogok makan 2014 di depan DPR RI dan audiensi sering dilakukan untuk melobi atau bahkan ngemis-ngemis, setiap fraksi didatangi satu per satu untuk diminta dukungan. Bertemu Bung obon dari fraksi democrat yang mendukung, fraksi PKS juga mendukung. Juga bersama pengajuan draft RUU PPRT dan Penghapusan Kekerasan Seksual 2019, dan fraksi-fraksi dihadiri 8 fraksi seperti Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, dimana kami menyampaikan isi draft, tanggapannya mereka mendukung dan menerima apresiasi kami, tetapi itu hanya menerima aspirasi masyarakat, belum tau akan masuk prolegnas 2020-2024 atau bahkan prioritas tahun 2020 ini.

- Pewawancara : Sebelumnya RUU PRT sudah pernah masuk prolegnas?
- Narasumber : Pernah, ditahun 2012-2014, tahun 2015 dikeluarkan, sebenarnya masih di Baleg kata fraksi PKS, sempat ada studi banding juga ke korea oleh pembuat kebijakan, tetapi tidak ada hasilnya. RUU PPRT hanya ditumpuk dengan RUU lainnya.
- Pewawancara : Pernahkan pemerintah meluruskan ke JALA PRT mengapa RUU PRT belum disahkan?
- Narasumber : Sebenarnya ketika gagal masuk, ada satu partai yang tidak setuju yaitu Golkar, karena yang diributkan adalah masalah UMR, mereka ketakutan, yang mereka pikirkan lalu bagaimana dengan majikan, maka dari itu sekarang kita tidak mengajukan UMR, karena memang itu media yang mengangkat istilah UMR, untuk 2020-2024 ini, hanya 4 prioritas, libur mingguan, THR, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan dan bebas berserikat.
- Pewawancara : Apakah posisi dukungan Partai Politik berubah-berubah?
- Narasumber : Untuk periode ini mereka mendukung, namanya juga politik, bahkan kami menghubungi serentak melalui sms ke Komisi IX, tetapi dari fraksi-fraksi yang membaca, tidak semuanya menanggapi.
- Pewawancara : Aktor elit yang membantu dalam gerakan advokasi?
- Narasumber : Dari tahun 2009-2014 ada mbak rike yang membantu, tapi terkalahkan sama Golkar, tidak bisa mengabulkan jadinya. Bung Obon dari pergerakan buruh juga mendukung. Mbak Rike juga sebenarnya masih mendukung dan ikut memperjuangkan RUU PRT. Ketua fraksi PKS juga mengatakan RUU PRT akan menjadi program yang di usung oleh PKS.

- Pewawancara : Apakah selama advokasi JALA PRT ini isu-isu PRT juga berkembang?
- Narasumber : Semakin banyak PRT yang ikut mengorganisasikan, mungkin menyadari yang dulu dianggap bukan masalah sekarang sadar bahwa itu masalah, lalu melaporkan ke JALA PRT, tidak hanya masalah upah tetapi juga kekerasan seksual, trafficking, penyekapan. Seperti gunung es, dari dulu banyak, tapi baru terbuka dan berani melaporkan sekarang, tahun 2018 tercatat 427 kasus yang melapor ke JALA PRT, dari upah dan kekerasan seksual fisik. Kasusnya makin meningkat sampai sekarang.
- Pewawancara : Kalau ada pekerja rumah tangga yang melapor, proses selanjutnya bagaimana bu, mempertimbangkan belum ada hukum yang melindungi PRT?
- Narasumber : Di JALA PRT ada tim paralegal, dari teman-teman serikat juga, apabila ada kasus maka teman-teman ini yang membantu. Lalu sehabis cerita ditentukan apakah langsung ke jalur hukum atau ke majikan terlebih dahulu. Contohnya ada PRT yang tidak diupahi, melapor dan minta dibantu di Jakarta. Di Yogyakarta juga ada kasus diberhentikan secara sepihak, ternyata majikan juga bersikeras tidak mau memberi pesangon, dari situ apa ke LBH Yogyakarta atau ke majikan dulu, baru ke hukum.
- Pewawancara : Bagaimana dengan hubungan JALA PRT dengan Organisasi Internasional?
- Narasumber : Di tahun 2000 itu, kita membangun hubungan ke Jaringan Perempuan Asia, (CAW) jadi tidak langsung ke ILO, lalu juga *Asian domestic workers network*, tetapi karena PRT tidak hanya di asia saja, tahun 2007, kita membentuk jaringan internasional dengan IDWF, masih banyak lagi kerja samanya. Salah satunya besok Filipina (UNITED dan LEARN) dan

Malaysia akan kunjungan ke Jakarta, kita sedang mengembangkan Metode Rap, berusaha bagaimana PRT bisa mengajak PRT yang lain agar mudah atau fleksibel untuk bergabung dengan perserikat. Dan isu yang kami sedang angkat yaitu BPJS atau jaminan ketenagakerjaan dibantu dengan teman internasional, tahun 2019 ini, sudah melakukan pengorganisasian diawali di Jakarta, ada 200an yang sudah memiliki kartu jaminan ketenagakerjaan, ada yang bayar sendiri, ada yang dibayar majikan, ada yang setengah-setengah. Dilanjut oktober ini DIY juga mulai mendaftarkan, dan dilanjut serikat lain. Lewat JALA PRT juga pendaftarannya agar bisa diambil datanya juga.

Pewawancara : Setelah membangun hubungan dengan Organisasi internasional terbantu tidak untuk menekan pemerintah?

Narasumber : Terbantu itu sejak ada Konvensi nya ILO No.189 di tahun 2011, dulu yang Pak Susilo Bambang Yudhoyono di Jenewa 2011, Tunas Mulia juga ikut hadir kesana, dengan ILO kita bekerja sama terkahir 2018 khususnya peningkatan Metode Rap, untuk advokasi PRT di empat wilayah Jakarta, Surabaya, Makassar dan Lampung.

Pewawancara : Karena sangat susah untuk mencari data mengenai PRT, apakah setelah ada hubungan internasional terbantu dalam hal itu?

Narasumber : Iya, dari kerja sama dengan ILO kami tau bahwa ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Karena kita kan belum formal jadi seperti itu. Metode kita itu dalam mengolah informasi adalah singkat, padat dan foto-foto. Untuk upaya merubah pandangan masyarakat dan pemerintah. Melalui media tungku menyala, kompas, siaran radio, talkshow dengan Televisi, dan diskusi-diskusi dengan mahasiswa. Merangkum isu itu juga melalui bercerita, seperti teater yang ada di JALA PRT, dimana mengundang pemerintah dan masyarakat, dari

kejadian-kejadian yang dialami, perlakuan kekerasan yang dirasakan oleh PRT, setelah selesai kami melakukan dialog dengan pemerintah dan masyarakat. Dilakukan di Yogyakarta awalnya, sekarang juga di Jakarta, Solo, Semarang, di setiap persrikatan.

Pewawancara : Apakah ada tindakan yang menjadi symbol dan monumental dalam proses advokasi JALA PRT?

Narasumber : Di JALA PRT, di tanggal 15 Februari 2007, kami melakukan launching hari Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta dan Surabaya, kami melakukan banyak demonstrasi, berbagai macam aksi besar untuk menyuarakan tentang PRT, dan tanggal itu juga mengenang PRT ada yang meninggal di tahun 2001. Kini setiap tanggal 15 Februari selalu melakukan peringatan, dengan cara demonstrasi, atau pembuatan meme di media sosial. Sebelum ada media sosial yang modern, kini terbantu karena persebaran menjadi lebih luas, sudah bisa internasional.

Pewawancara : bagaimana cara JALA PRT sendiri menyamakan posisi tawar dengan pemerintah?

Narasumber : Melalui tuntutan UMR ini, karena pemerintah ini kan mereka majikan juga ya yang bisa kena imbas UU ini, kemudian kami tidak mulu-mulu itu mengenai UMR, yang penting ada perlindungan hukum dulu dan 4 prioritas itu, kami juga wanti-wanti ke fraksi-fraksi kalau kami tidak melulu meminta UMR.

Pewawancara : Bagaimana cara JALA PRT mengawasi janji pemerintah yang sudah diberikan?

Narasumber : Kami selalu dorong lewat sms, wa, telpon, menagih kapan bisa bertemu, selalu mengingatkan lewat twitter, agar mereka ingat dan memberi tindakan. Nawa Cita Jokowi juga membahas mengenai RUU PPRT, tahun periode pertama, teman-teman PRT audensi ke Pak Jokowi, beliau mengatakan mendukung dan di

tahun 2014, sebelum pemilu kami ada point untuk Jokowi agar beliau mengingat dan memberi mandat tentang RUU PPRT. Sampai sekarang belum ada kemajuan, ada Permenaker no 2 tahun 2015. Tetapi surat menteri kan hukumnya tidak kuat untuk melindungi, kami jadikan untuk mendesak agar majikan memberi jaminan ketenagakerjaan.

Pewawancara : Bagaimana kemajuan Indonesia dibandingkan dengan negara lain mengenai PRT?

Narasumber : Tertinggal jauh, Finlandia dan beberapa negara Eropa sudah menjamin pekerja buruh dan PRT oleh negara, di Filipina dan Hongkong juga sudah ada UU PRT dan jaminan ketenagakerjaan.

Pewawancara : Strategi selanjutnya untuk menekan pemerintah?

Narasumber : Untuk saat ini kami akan selalu datang ke fraksi-fraksi, mengirim surat ke Komisi IX, terus melakukan audiensi-audiensi, di DPR juga baru akan menentukan mana yang akan diprioritaskan, banyak yang mengajukan RUU lainnya juga. Presiden menitipkan khususnya untuk ketenagakerjaan untuk disahkan, untuk kami JALA PRT asalkan diutamakan 4 prioritas itu.

Pewawancara : Apabila masuk prolegnas apa tahap selanjutnya?

Narasumber : Jangan lengah dan digeser oleh RUU yang lain, caranya itu mendekati orang dalam terus. Dan terus meluruskan bahwa kami tidak melulu menuntut UMR, yang itu yang paling ditakuti oleh pemerintah. Karena ini kan juga untuk pekerja migran ya, pernah dibicarakan apabila tidak bisa melindungi yang di negara sendiri bagaimana di negara orang lain. Yang dialami kan sebenarnya sama saja ya antara yang dalam negeri dan di luar kekerasan, pengekapan dan eksploitasinya. Setiap kali ada kasus yang dialami oleh PRT di luar negeri kami juga akan melakukan aksi kepada pemerintah.



## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 3 Wawancara bersama Aktivistis JALA PRT pada tanggal 13 November 2019



Gambar 2 Berfoto Bersama Aktivistis JALA PRT Setelah Wawancara



Gambar 1 Focus Group Discussion JALA PRT bersama UNITED dan LEARN Mengenai Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga pada 15 November 2019. Sumber: Halaman Facebook Tunas Mulia



Gambar 4 LEARN Menerangkan Kondisi Pekerja Rumah Tangga di Filipina. Sumber: Halaman Facebook Tunas Mulia